BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum, di mana seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur dan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Pedoman ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan tertulis yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap individu yang berada dalam yurisdiksinya. Sebagai negara hukum, sistem pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Dalam konsep negara hukum, terdapat sejumlah asas yang menjadi landasan, salah satunya tercantum dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara."¹. Ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas pemeliharaan anak-anak terlantar. Dengan demikian, pemerintah memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan kelangsungan hidup anak-anak terlantar. Tanggung jawab tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan tempat tinggal yang layak untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak, yang kemudian mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dijelaskan bahwa perlindungan terhadap anak mencakup serangkaian tindakan atau aktivitas yang memiliki tujuan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak, serta melindungi hak-hak yang dimilikinya. Perlindungan ini bertujuan agar setiap

¹ Lihat Undang – Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1.

anak dapat hidup dengan baik, tumbuh dan berkembang secara optimal, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dengan penuh rasa penghargaan terhadap nilai-nilai harkat dan martabat kemanusiaannya. Tak kalah penting, perlindungan ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat bebas dari segala bentuk kekerasan, perlakuan yang tidak adil, serta diskriminasi yang dapat merugikan mereka.²

Segala bentuk aktivitas atau upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan serta pemeliharaan kepada anak-anak mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan, tumbuh, dan berkembang dengan optimal. Semua itu dilakukan sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga memiliki tujuan yang sangat penting untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi maupun tindak kekerasan yang berpotensi membahayakan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perlindungan dan pemeliharaan yang bersifat preventif sejak usia dini, agar dampak dan hasil yang diperoleh dari upaya tersebut dapat lebih maksimal dan efektif dalam jangka panjang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak diartikan sebagai keturunan atau individu yang masih berada dalam tahap perkembangan, yang umumnya dimulai sejak kelahiran hingga masa remaja. Ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa seorang anak adalah individu yang dilahirkan oleh orang tua tertentu. Selain itu, anak juga dapat didefinisikan sebagai individu yang masih muda atau belum

² Tantri Kusuma Wati dkk, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Anak.(PUBLICIANA Vol. 16:Kediri), Tahun 2023 Hal.1.

mencapai usia dewasa, yang sering kali diidentifikasi sebagai individu berusia di bawah 18 tahun.

Di berbagai kota besar di Indonesia, saat ini sedang terjadi peningkatan jumlah penduduk dengan laju yang sangat pesat. Kondisi ini membawa dampak signifikan, terutama dalam bentuk berbagai permasalahan besar yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta sektor-sektor lainnya. Salah satu tantangan utama di bidang sosial yang sering muncul adalah semakin banyaknya jumlah anak-anak terlantar. Anak-anak ini seharusnya mendapatkan perhatian dan perlindungan penuh dari negara, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan tegas menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggung jawab negara untuk dipelihara dan dijaga.³

Salah satu pasal yang menguraikan tentang sila kelima Pancasila dapat ditemukan dalam Pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Di dalam Negara Indonesia, diterapkan suatu perspektif yang dikenal dengan istilah *Welfare State*, yang mengandung makna bahwa negara memiliki komitmen untuk menyediakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program sosial yang mencakup sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat serta memberikan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pada hakikatnya, negara memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat besar, yang sesuai dengan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Dalam sistem pemerintahan ini, peran pemerintah menjadi sangat penting dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan kesejahteraan masyarakat. Konsep

³ Pipin Syaripin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia), hal.247, tahun 1999.

Welfare State menekankan bahwa pemerintahan bertugas menyediakan layanan sosial dan kesejahteraan untuk memastikan tercapainya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Pada dasarnya Selain Indonesia menjadi negara hukum, Indonesia juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum positif dan konstitusi yang mengatur kehidupan berbangsa di negara ini. Namun, Indonesia juga memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai-nilai dan prinsip Islam karena mayoritas penduduk adalah Muslim dan Islam memainkan peran penting dalam sejarah serta budaya bangsa. Dalam hal ini, pemerintahan Indonesia yang menganut prinsip *welfare state* juga sangat bisa disandingkan dengan perspektif *Fiqih syasyah* atau biasa disebut juga dengan *Fiqih politik Islam*, Di mana pemerintah juga harus memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat mendukung sistem kesejahteraan sosial. *Fiqih Siyasa* berfokus pada hukum dan prinsip-prinsip politik dalam Islam untuk membangun dan menjalankan kesejahteraan Masyarakat di mana prinsip ini sesuai dengan perspektif *welfare state* yang telah kita bahas di atas. *Fikih Syiasyah* berfokus pada hukum dan prinsip politik dalam Islam, dan dapat diadaptasi untuk mendukung kebijakan-kebijakan *welfare state* yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Pada kesempatan kali ini, penulis akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai kondisi anak-anak terlantar, sebuah permasalahan sosial yang merupakan salah satu tanggung jawab yang harus diemban oleh pemerintah. Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh UNICEF, anak-anak terlantar, yang sering kali dikenal dengan istilah anak jalanan, dapat dibagi menjadi dua kategori utama yang berbeda. Kategori pertama adalah *children on the street*, yang mencakup anak-anak yang meskipun hidup di jalan, masih memiliki ikatan yang kuat dengan orang tua atau keluarga mereka. Mereka tetap dapat menjalin hubungan dengan keluarga meskipun berada dalam

kondisi yang sangat memprihatinkan. Sedangkan kategori kedua, yaitu *children of the street*, merujuk pada anak-anak yang sudah tidak memiliki hubungan yang erat, bahkan terputus sama sekali, dengan orang tua atau keluarga mereka. Kategori ini menggambarkan anak-anak yang benar-benar hidup tanpa dukungan dari keluarga mereka, dan sering kali mengalami kondisi yang lebih sulit dan rawan.⁴

Peter Devis menyatakan bahwa fenomena yang terjadi berupa peningkatan jumlah anak yang terabaikan atau menjadi anak jalanan, merupakan sebuah tanda yang mencerminkan adanya masalah yang bersifat global. Proses urbanisasi yang sangat pesat dan terus berkembang telah menyebabkan peningkatan jumlah kawasan kumuh di sejumlah kota besar, baik yang ada di negara berkembang maupun negara maju. Keadaan ini, pada gilirannya, memaksa anak-anak yang berasal dari keluarga yang terjebak dalam kemiskinan untuk terjun ke jalanan, guna mencari sumber penghasilan tambahan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, sekaligus membantu keberlangsungan hidup keluarga mereka yang sangat bergantung pada pendapatan tersebut.

Setelah penjelasan anak terlantar diatas menurut pemerintahan pusat, kini kita akan membahas perlindungan yang harus didapat oleh anak terlantar pada Tingkat lokal atau pada Tingkat kabupaten pada kesempatan ini penulis mengambil kabupaten Tulungagung untuk Lokasi penelitian. Dalam peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 tentang system penyelenggaraan perlindungan anak.⁵ Perda ini menjelaskan tentang sistem-sistem yang akan dilakukan Kabupaten Tulungagung guna menjadi Kabupaten layak anak

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup),hal. 02, 2010.

⁵ Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

yang dijelaskan pada ketentuan umum pasal 1 ayat 8 sampai ayat 11.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak terlantar diatur secara rinci dengan tujuan antara lain untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar anak. Anak-anak yang terlantar berdasarkan peraturan daerah, anak terlantar adalah anak yang dipisahkan dari orang tua atau walinya, terlantar, dan tidak mendapat pengasuhan yang memadai. Pemerintah daerah mempunyai tugas menyediakan fasilitas dan pelayanan sosial yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, antara lain, Melindungi dan memelihara hak atas pendidikan, perawatan dan reintegrasi. Selain itu, Perda ini juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait dalam mengatasi masalah anak terlantar secara komprehensif. Dalam implementasinya, pemerintah daerah diharapkan mampu mencegah munculnya anak terlantar dan memberikan penanganan yang tepat terhadap anak terlantar, termasuk melalui pendataan yang akurat dan layanan berkelanjutan yang mendukung pemulihan anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik 3 rumusan masalah sebagai fokus penelitian ini diantaranya:

1. Apa saja pelayanan sosial yang diterapkan di Kabupaten Tulungagung pada anak terlantar?
2. Bagaimana pelayanan sosial yang diterapkan pada kabupaten Tulungagung terhadap anak terlantar dalam prespektif *Welfare State*?
3. Bagaimana pelayanan sosial yang diterapkan pada kabupaten Tulungagung terhadap anak terlantar dalam prespektif *Fiqih Syiasyah Dusturyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Memahami tentang pelayanan sosial yang diberikan oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung pada anak terlantar.
2. Untuk memahami pelayanan sosial yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung pada anak terlantar berdasarkan prespektif *Welfare State*.
3. Untuk memahami pelayanan sosial yang diterapkan oleh pemerintahan Kabupaten Tulungagung pada anak terlantar berdasarkan prespektif *Fiqih Syiasyah Dusturyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian terkait hal ini dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan teori *welfare state* dengan menunjukkan bagaimana implementasi pasal konstitusi terkait kesejahteraan sosial dijalankan di tingkat lokal. Ini Membantu memperjelas hubungan antara prinsip prinsip *welfare state* dan praktik praktik kebijakan lokal khususnya dalam pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Selain itu studi ini juga memberikan kontribusi pada literatur *fikih siyasah Dusturyah* dengan menunjukkan bagaimana prinsip prinsip *Fiqih Syiasyah Dusturyah* terkait kesejahteraan sosial Yang dikolaborasikan dalam kebijakan publik dan implementasinya. Selain itu penelitian ini dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum positif dan prinsip prinsip agama dapat dikolaborasikan dalam praktik pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat menjadi suatu pemahaman baru atau bisa menjadi pengetahuan lebih luas lagi terkait dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah*.
- b. Bagi peneliti khususnya, harapan yang besar dapat dijadikan bahan acuan atau menjadi rujukan dan pertimbangan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, bisa menjadi pedoman baru dalam melakukan penelitian dan dapat menyempurnakan penelitian sebelumnya terkait dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah pada point ini bertujuan untuk menyamakan prespektif antara peneliti dan juga penguji maupun pembaca. Hal ini karena terdapat beberapa aspek penting yang harus dimengerti dengan baik untuk mencegah adanya salah pengartian oleh peneliti atau penulis selanjutnya. Oleh karena itu, peneleti memberikan penjelasan lebih tentang Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah* studi kasus Kabupaten Tulungagung. Maka, dipaparkan istilah dalam penulisan sebagaimana berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tahapan di mana rencana, kebijakan, atau ide diterapkan dalam kehidupan nyata. Proses ini sangat penting, terutama dalam konteks kebijakan publik, karena pada tahap ini kebijakan tersebut diuji dan dijalankan di tengah masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁶ Penjelasan mengenai implementasi sangat diperlukan agar pemahaman tentang konsep ini dapat diselaraskan dengan penelitian terkait kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus utama dalam kajian ini.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan implementasi adalah merujuk pada penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 mengenai sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Studi implementasi dilakukan dengan tujuan utama untuk memahami dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan memberikan umpan balik terkait penerapan kebijakan, mengevaluasi apakah pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi berbagai hambatan atau permasalahan yang mungkin muncul selama proses implementasi berlangsung.

⁶ Kamus besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 13 September 2024.

b. Anak terlantar Menurut UUD 1945

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki pedoman bahwa segala bentuk kehidupan diatur atau dilandaskan pada hukum, Tertulis dan dikemas dalam bentuk peraturan yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh semua orang yang berada dibawahnya. Indonesia dikategorikan sebagai negara hukum, yang berarti bahwa sistem pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara diatur dan dilandasi oleh hukum.⁷ Pada negara hukum terdapat beberapa prinsip yang kerap disandingkan pada negara hukum. Terkhusus pada Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara".⁸

c. Anak Terlantar Sebagai Tanggung Jawab Pemerintahan

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki kewajiban yang besar dalam upaya melindungi serta merawat anak-anak yang terlantar di wilayahnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 Tahun 2017 yang mengatur mengenai sistem penyelenggaraan perlindungan anak. Program kerja yang terkait dengan hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung melalui pelayanan sosial yang sudah disusun. Dengan demikian, pemerintah daerah bertanggung jawab penuh terhadap anak-anak terlantar di Kabupaten Tulungagung, memastikan bahwa kesejahteraan mereka diperhatikan secara serius untuk

⁷ Hoirun Nisa', Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Tentang Perlindungan Anak Terlantar Di Dinas Sosial Kabupaten Jember,(Jember:Skripsi) hal. 22, tahun 2020.

⁸ Lihat Undang – undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat 1.

mewujudkan implementasi yang efektif dari Perda tersebut.

d. *Welfare State*

Negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah suatu konsep pembangunan yang menempatkan negara dalam posisi yang sangat penting dan berperan secara aktif dalam melindungi dan memastikan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini meliputi perlindungan terhadap ancaman-ancaman serius seperti kemiskinan, ketertinggalan sosial, kebodohan, serta masalah-masalah kesehatan yang dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, beliau menjelaskan bahwa kriteria kesejahteraan mencakup sebuah keadaan di mana masyarakat secara luas dan terbuka menerima tanggung jawab negara dalam merumuskan kebijakan untuk menyediakan akses pendidikan serta pelatihan yang memadai bagi warganya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar individu-individu tersebut dapat memperoleh keterampilan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional, seperti dokter, perawat, pekerja sosial, ilmuwan, dan banyak profesi lainnya yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial. Istilah *welfare state* dengan jelas mencerminkan peran aktif dan sentral pemerintah dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat yang kurang beruntung, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan, demi tercapainya kesejahteraan sosial yang merata.⁹

⁹ Andi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, (Bandung:Refika Adinata), hal.103, tahun 2012.

Konsep negara kesejahteraan atau welfare state merujuk pada suatu sistem pemerintahan yang memiliki tujuan utama untuk memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Dalam sistem ini, peran pemerintah sangat vital, karena bertanggung jawab penuh untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menyediakan berbagai layanan publik yang memadai serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat untuk menjaga kesejahteraan mereka secara menyeluruh.

e. Fiqih Syiasyah

Fiqih Syiasyah dapat diartikan cabang dari ilmu fiqih (hukum Islam) yang khusus membahas tentang hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan serta tata negara dalam perspektif Islam, terutama dalam konteks Syiasyah. Salah satu pakar memberikan penjelasan tentang Fiqih Syiasyah sebagaimana berikut Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai, seorang ulama Syiah terkenal, mendefinisikan *fiqih syiasyah* sebagai cabang fiqih yang mengatur aspek-aspek pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Fiqih ini meliputi aturan tentang kepemimpinan, administrasi negara, dan hak-hak warga negara.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan operasional merupakan peran penting dalam penelitian ini guna membatasi penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif Welfare State dan Fiqih Syiasyah. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung)”. Menjelaskan tentang bagaimana Implementasi pasal tersebut pada penerapannya di Kabupaten Tulungagung. Pada konsep ini Negara

Kesejahteraan sangatlah diperlukan guna melindungi dan menjaga anak terlantar.

F. Sistematika Keperulisan

Guna mewujudkan penelitian yang sistematis dan terarah, maka penulis Menyusun penelitian ini dengan dimuatnya Enam bab, mulai bab I sampai dengan VI. Berikut rincian dari bab-bab tersebut:

BAB I Pendahuluan, yang mana pendahuluan ini menyajikan uraian konteks penelitian, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penejelasan istilah, dan sistematika pembahasan pada penelitian Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung).

BAB II Kajian Pustaka, yang berisi kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, Hasil penelitian terdahulu dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung).

BAB III Metode penelitian yang terdiri dari Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung).

BAB IV Hasil Penelitian, merupakan upaya peneliti untuk meneliti topik pada judul yang dipilih oleh peneliti, yang bisa diartikan sebagai pemikiran asli peneliti yang bersifat hipotesis

dan memberikan penjelasan juga jawaban atas hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V Analisis disini adalah inti dari penelitian yang diajukan dalam topik pembahasan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung). Yang telah peneliti analisis dari sumber data yang telah didapatkan oleh peneliti.

BAB VI Kesimpulan, memuat kesimpulan atas penelitian yang diajukan dan saran terhadap penelitian berkaitan dengan Implementasi Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No. 23 tahun 2017 dalam prespektif *Welfare State* dan *Fiqih Syiasyah Dusturyah*. (Studi Kasus Kabupaten Tulungagung).